



# LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2022



# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta atas penggunaan anggaran Tahun 2022, dimana hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Jakarta, 30 Januari 2023  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi DKI Jakarta.

*Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022*

# D A F T A R I S I

---

---

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Ringkasan Eksekutif	III
BAB I	1 - 8
BAB II	10 - 16
BAB III	18 - 54
BAB IV	56 - 58
LAMPIRAN	60 - 72

---

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah unsur perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk itu, kinerja Satpol PP didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 serta Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memiliki 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, 8 (delapan) Sasaran Khusus, dan 3 Sasaran Operasional. Satuan Polisi Pamong praja juga mendukung pencapaian tujuan RPJMD Gubernur DKI Jakarta dengan melaksanakan indikator tujuan Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS), dengan penetapan target Tahun 2022 sebesar 22.47 Indeks. Dalam mencapai sasaran strategisnya, terdapat 2 (dua) program pendukung dengan 3 (tiga) indikator program yang ditetapkan. Berikut adalah capaian kinerja maupun anggaran yang telah dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.





# BAB I

# PENDAHULUAN

*Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022*

# A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah untuk menginformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022. Laporan Kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang evaluasi dan analisa capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai kegiatan tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

# B. TUJUAN DAN MANFAAT LAPORAN KINERJA



**D**alam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia

setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan Pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

## TUJUAN

- Memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2022
- Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

## MANFAAT

- Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran pelaporan dan evaluasi kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
- Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

## **C. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat

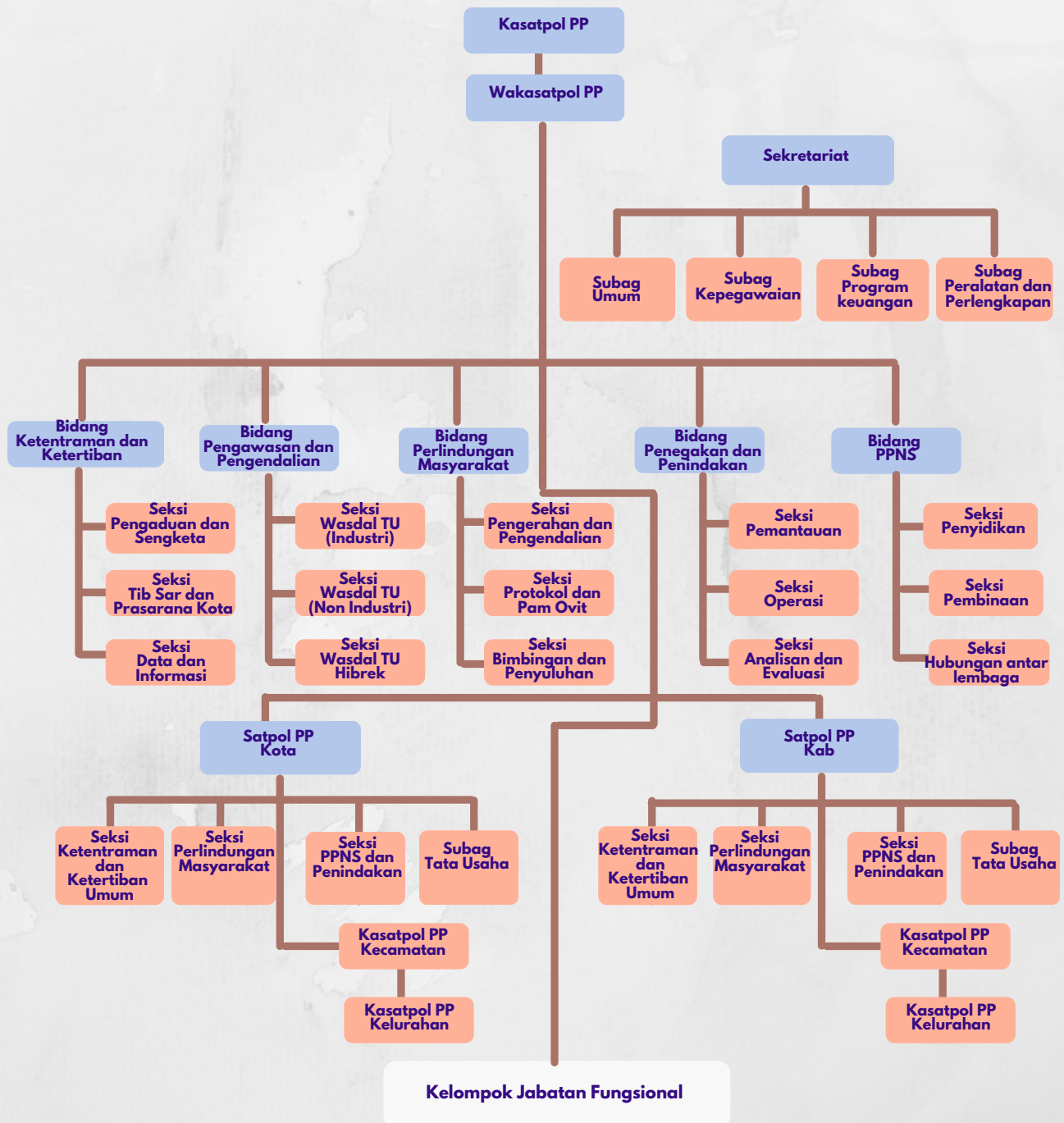
## D. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA

Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Satpol PP;
- Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP;
- Penyusunan kebijakan, pedoman, dan standar teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP;
- Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum;
- Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Pergub penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan SKPD/UKPD dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- Pemberian bantuan dan dukungan dalam penegakan peraturan perundang-undangan oleh SKPD/UKPD;
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Penyusunan dan penyajian data penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Melakukan Pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi pelanggaran Perda dan Pergub serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- Melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi bencana;
- Menghimpun dan menganalisa data sebagai strategi untuk mendukung pelaksanaan Penegakan Perda dan Pergub;
- Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/Pergub;
- Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Satpol PP;
- Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Satpol PP;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

## E. STRUKTUR ORGANISASI

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 285 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA



Pada Bulan Desember 2021 Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi, yaitu sebanyak 3 (tiga) pejabat pengawas telah dialihkan ke jabatan fungsional. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran birokrasi yang lebih dinamis, tangkas dan profesional guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

## F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum memenuhi harapan masyarakat. Terlebih dalam situasi global-internasional yang semakin menantang dengan segala tuntutan dan diskursus yang secara jelas menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dan fakta yang terjadi.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota metropolitan memiliki peran strategis dalam kondusifitas wilayah sebagai faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan. dengan tipikal penduduk yang berasal dari kalangan masyarakat heterogen baik suku, bangsa di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya harmonisasi yang mampu meredam maupun meminimalisir berbagai konflik dan kerawanan sosial dari mulai vertikal maupun horizontal dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil



# G. SUMBER DAYA MANUSIA

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022 Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022 seluruhnya berjumlah 5.230 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PNS sebanyak 2.873 orang;
- 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1.570 orang; dan
- 3) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) sebanyak 787 orang.

b. Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Golongan Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Berdasarkan Golongan, Eselon dan Pendidikan

No	Kualifikasi	Satuan Polisi Pamong Praja							Jumlah
		Provinsi	JP	JU	JB	JS	JT	P.1000	
A.	Golongan (Jumlah) - PNS	250	551	443	367	590	572	100	2873
	1. Golongan IV	18	2	3	5	4	5	5	42
	2. Golongan III	115	148	152	109	201	190	46	961
	3. Golongan II	117	397	286	248	380	371	49	1848
	4. Golongan I	0	4	2	5	5	6	0	22

Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar sebanyak 2.290 orang dan pegawai yang telah mengikuti Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebanyak 239 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pol PP Tingkat Dasar

TAHUN DIKLAT	JUMLAH
2005	50 pegawai
2008	75 pegawai
2009	225 pegawai
2010	375 pegawai
2011	225 pegawai
2012	450 pegawai
2013	200 pegawai
2014	450 pegawai
2018	120 pegawai
2019	120 pegawai
2020	Nihil
2021	Nihil
2022	Nihil
TOTAL	2.290 pegawai



Dalam rangka pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP, dilakukan juga kegiatan Bimtek dan Kediklatan, diantaranya Diklat Intelijen, Diklat PPNS, Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepamongprajaan hingga pelatihan First Aid Basic (FAB).



PAKINDRO

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

*Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022*

## A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Strategis secara teknis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dijabarkan visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017 dan 2022 adalah :

**"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua"**

Dalam Rencana Strategisnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pencapaian Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu Misi 1 dan Misi 3 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

<b>Misi 1</b> Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan	<b>Tujuan</b> Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	<b>Sasaran</b> Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial
<b>Misi 3</b> Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas	<b>Tujuan</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	<b>Sasaran</b> Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka mencapai misi 1 dan 3, yaitu :

### 1. MISI PERTAMA

Menjadikan Jakarta Kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreatifitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

### 2. MISI KETIGA

Menjadikan Jakarta wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, meritokratis dan berintegritas

Tujuan pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai Misi pertama adalah mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada. Untuk mencapaitujuan tersebut, sasaran yang dicapai adalah terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Indikator tercapainya sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatnya presentase penyelesaian pelanggaran perda dan/atau perkada terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Diharapkan pada Tahun 2022 penyelesaian tersebut akan mencapai 90% dari kasus yang tercatat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
2. Meningkatnya persentase berkas perkara kasus pelanggaran perda dan/atau perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan kategori P21. Peningkatan persentase ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penegakan hukum. Pada Tahun 2022 diharapkan akan mencapai 25%.

Tujuan pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai misi tiga adalah "Mewujudkan tata kelola organisasi Satpol PP yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua sasaran yang dicapai adalah pertama, "terwujudnya pelayanan kantor yang optimal, efisien dan efektif dalam mendukung kinerja pegawai" dan kedua, "terwujudnya pelayanan tramtibum di wilayah melalui patroli anggota Satpol PP". Indikator tercapainya sasaran pertama adalah meningkatnya indeks kepuasan pelayanan kantor. Pelayanan kantor yang optimal, efisien dan efektif berdasarkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel mendorong meningkatkan indeks kepuasan. Indikator tercapainya sasaran kedua adalah Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional. Pengelolaan pelayanan patroli anggota dengan memanfaatkan kendaraan operasional yang mumpuni dan dapat diandalkan akan mendorong meningkatnya kepuasan dalam pelayanan kendaraan operasional

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pada kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional sebagai kinerja pejabat eselon 2.

Untuk Program dan Kegiatan pada Perjanjian Kinerja sebagai kinerja pejabat eselon 3 yaitu:

- Program Peningkatan Ketenteraman Ketertiban Umum terdapat 2 Indikator Kinerja yaitu:
  1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Target Tahunan 90 Persen;
  2. Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21, dengan Target Tahunan 25 Persen.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor, target 4 Indeks di akhir Tahun.

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun untuk Sub Kegiatan pada Perjanjian Kinerja sebagai kinerja pejabat eselon 4 yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, target 100 persen di akhir Tahun.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Nilai kepuasan terhadap Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, target 4 nilai di akhir tahun,
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 4 nilai di akhir tahun,
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan target 4 nilai di akhir tahun,
- Penyediaan Bahan/Material dengan indikator Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material, target 4 nilai di akhir tahun,
- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator Nilai kepuasan terhadap Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, target 4 nilai di akhir tahun,
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target 4 nilai di akhir tahun,
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target 4 nilai di akhir tahun,
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, target 4 nilai di akhir tahun,
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, target 4 nilai di akhir tahun,
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan indikator Persentase Pelaksanaan Patroli Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, target 100 persen,
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan indikator Jumlah Laporan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sengketa Serta Penutupan Tempat Usaha/Penghentian Kegiatan Usaha, target 4 laporan,

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dengan indikator Jumlah Laporan Kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Satpol PP, target 4 laporan,
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin Bagi SDM Satpol PP, target 100 persen,
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan/atau Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, target 100 persen,
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kepada Masyarakat Peduli Tramtibum, target 100 persen dan Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Harmonisasi Perda/Raperda kepada masyarakat, target 100 persen,
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan indikator Persentase Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, target 100 persen,
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan indikator Jumlah Laporan Kinerja Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tepat Waktu, target 2 laporan,
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan indikator Jumlah Dokumen Naskah Akademis Terkait PPNS Yang Disusun, target 1 dokumen.



## C. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan	Target				
				Indikator Program	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial		Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47
			Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan/ perkada terkait ketenteraman dan ketertiban umum	55	55	70	80	90
			Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial	Persentase berkas perkara kasus pelanggaran perda dan/atau perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan kategori P21	5	10	15	20	25
2	Mewujudkan tata kelola organisasi Satpol PP yang transparan dan akuntabel			Skor EKPPD	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3
		Terwujudnya pelayanan kantor yang optimal, efisien dan efektif dalam mendukung kinerja pegawai	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Trantibum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3	3	3	4	4
		Terwujudnya pelayanan trantibum di wilayah melalui patroli anggota Satpol PP	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	4	4

(Sumber data Renstra Satpol PP DKI Jakarta )

### Perubahan Renstra 2018-2022

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap LKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, dilakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2017-2022. Sehingga di tahun 2022 terdapat perubahan dalam RPJMD terutama dalam penetapan tujuan dan sasaran, selain itu ditetapkan pula indikator tujuan yang sebelumnya tidak ada di RPJMD. Rencana Stategis Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) yang tadinya merupakan indikator sasaran ditetapkan menjadi indikator tujuan RPJMD.

Dampak dari perubahan tujuan dan sasaran RPJMD ini tentu saja berpengaruh terhadap perubahan Renstra, dimana Satpol PP menyederhanakan dari 2 (dua) tujuan menjadi 1 (satu) tujuan yaitu mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada. Sedangkan untuk sasaraan juga disedernakan dari 3 (tiga) sasaran menjadi 2 (dua) sasaran yaitu:

- Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial
- Terwujudnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien



# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



# A. Capaian Kinerja

## 1. Capaian Kinerja Pejabat Eselon 2

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis</b>						
1	Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)	Nilai	22,47 N/A karena tidak ada pengukuran penilaian IPKS oleh BPS Tahun 2022	N/A	100%
2	Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	Persentase	95	95,86	100%
3	Terwujudnya Jalan Unggulan Tertib Ketenteraman dan Ketertiban Umum di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten dan Kecamatan	Persentase Jalan Unggulan Tertib Ketenteraman dan Ketertiban Umum di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten dan Kecamatan	Persentase	100	100	100%
4	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	100	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91	100	100%
6	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase	100	100	100%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga	Persentase penyelesaian rencana aksi penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko	Persentase	100	100	100%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Persentase	100	100	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Persentase	100	100	100%
10	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Persentase	100	100	100%
<b>Sasaran Khusus</b>						
11	Terselesaikannya sanksi pelanggaran 5M (Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak)	Persentase penyelesaian sanksi pelanggaran 3M (Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)	Persentase	100	100	100%
12	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini Laporan Keuangan	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100%
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100	100%	100%
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah	Persentase	100	100%	100%
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Predikat	AA (31)	AA (36,01)	100%
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Nilai	95	96,46	100%
17	Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi	Persentase	100	100	100%
18	Peningkatan penggunaan e-produk hukum	Jumlah perbal /produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persentase	100	100	100%
<b>Sasaran Operasional</b>						
19	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100%
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100	100	100%
21	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100%

(Sumber data Perjanjian Kinerja Satpol PP DKI Jakarta )

## 2. Capaian Kinerja Pejabat Eselon 3

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	90	92,72	100%
		Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan kategori P21	Persen	25	89,16	100%
2.	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	100%
3.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan	Indeks	4	4	100%
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Indeks	4	4	100%
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	100%
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	100%
7.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%
8.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	90	90	100%
9.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase PPNS Pemprov. DKI Jakarta yang mendapatkan Pembinaan	Persen	100	100	100%

(Sumber data Perjanjian Kinerja Satpol PP DKI Jakarta )

### 3. Capaian Kinerja Pejabat Eselon 4

No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	100	100%
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Kepuasan terhadap Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai	4	4	100%
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai	4	4	100%
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai	4	4	100%
5.	Penyediaan Bahan/Material	Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Nilai	4	4	100%
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai kepuasan terhadap Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai	4	4	100%
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai	4	4	100%
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai	4	4	100%
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai	4	4	100%
10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan terhadap sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai	4	4	100%
11.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Patroli Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%
12.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sengketa Serta Penutupan Tempat Usaha/Penghentian Kegiatan Usaha	Laporan	4	4	100%
13.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Satpol PP	Laporan	4	4	100%
14.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin Bagi SDM Satpol PP	Persen	100	100	100%
15.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Sarana dan/atau Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%
16.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kepada Masyarakat Peduli Tramtibum	Persen	100	100	100%
		Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Harmonisasi Perda/Raperda kepada masyarakat	Persen	100	100	100%
17.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persen	100	100	100%
18.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Kinerja Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tepat Waktu	Laporan	2	2	100%
19.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Dokumen Naskah Akademis Terkait PPNS Yang Disusun	Dokumen	1	1	100%

(Sumber data Perjanjian Kinerja Satpol PP DKI Jakarta )

## B. Capaian Strategis Kinerja

### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan gambaran kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta merupakan representasi dari keberhasilan Satpol PP dalam mencapai sasaran Jangka Menengah yang diukur dalam Indikator Kinerja sampai dengan akhir Tahun 2022. Secara rata-rata kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 telah tercapai. Sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yang telah diperjanjikan dan dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian  $\geq 90\%$  terhadap target yang telah ditetapkan yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran kinerja. Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Utama di Perangkat Daerah.

## Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)

Sejalan dengan Tujuan RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) ditetapkan menjadi indikator tujuan. IPKS merupakan suatu alat untuk mengukur, memantau dan memonitor perkembangan kerawanan sosial di suatu wilayah pada periode tertentu. IPKS adalah suatu angka indeks komposit (gabungan berbagai angka indeks) yang menggambarkan tingkat kerawanan sosial suatu wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan. Melalui Indeks komponen IPKS dapat diperoleh gambaran penyebab kerawanan pada suatu wilayah. Penyusunan IPKS di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan guna memetakan daerah-daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, sebagai langkah antisipasi.

Penyusunan IPKS dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan Pengukuran Indeks Potensi Kerawanan Sosial dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, sebelumnya dilaksanakan di tahun 2014 dan kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kepolisian Sektor (Polsek) di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, beberapa data pendukung didapatkan melalui data Potensi Desa (PODES) 2018, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi DKI Jakarta dan data RW Kumuh 2017. Sehubungan dengan pelaporan realisasi indikator kinerja pada Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melaporkan realisasi Nilai IPKS berdasarkan hasil Pengukuran IPKS tahun 2020 oleh BPS DKI Jakarta, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 BPS DKI Jakarta tidak melakukan Survey pengukuran IPKS.

### Realisasi Capaian IPKS Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2022	
Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada	Tingkat penegakan Perda dan Perkada	22,47	N/A	100%

(Sumber data BPS Provinsi DKI Jakarta)

Berdasarkan tabel diatas, target yang ditetapkan adalah sebesar 22,47 sedangkan realisasi IPKS N/A karena tidak ada pengukuran penilaian IPKS oleh BPS Tahun 2022. pengukuran penilaian IPKS terakhir dilakukan pada Tahun 2020 sebesar 18,98. Nilai IPKS berkisar antara 0 sampai dengan 100, dengan rincian semakin tinggi nilai IPKS suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin rawan atau berpotensi rawan sosial. Pencapaian realisasi IPKS yang nilainya berada dibawah target, menunjukkan bahwa potensi kerawanan sosial di DKI Jakarta telah berangsur menurun. Bahwa Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk Pengecualian Target Indeks Potensi Kerawan Sosial (IPKS) Nomor e-0027/RB.05.00 tanggal 9 Januari 2023 hal Pengecualian Target Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)

## Indikator Sasaran Tingkat Penegakan Perda dan Perkada

Untuk Target Indikator Sasaran Tingkat Penegakan Perda dan Perkada di tahun 2022 sebesar 95% dengan realisasi 95,86%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Adapun perhitungan Tingkat penegakan Perda dan Perkada mengukur kinerja Satpol PP secara preventif dan korektif. Rumus capaian = (persentase capaian giat preventif ditambah persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada) dibagi 2. Persentase capaian giat preventif = (jumlah giat preventif yang dilaksanakan dibagi jumlah giat preventif yang direncanakan) dikali 100% Persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada = (jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terdata) dikali 100%

## Indikator Sasaran Persentase Jalan Unggulan Tertib Ketenteraman dan Ketertiban Umum di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten dan Kecamatan

Pelaksanaan Indikator Sasaran Persentase Jalan Unggulan Tertib Ketenteraman dan Ketertiban Umum di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten dan Kecamatan berdasarkan SK Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0005 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengawasan Jalan Unggulan Tertib Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Adapun Target di tahun 2022 sebesar 100 persen dengan realisasi 100 persen dengan capaian sebesar 100%.

Jalan Unggulan Tertib Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan jalan binaan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diajukan oleh Para Kasatpol PP Kota/Kabupaten Administrasi dan Para Kasatpol PP Kecamatan dengan terpenuhinya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Bebas dari kemacetan dan parkir liar;
2. Bebas dari pedagang kaki lima liar;
3. Bebas dari penyalahgunaan trotoar;
4. Bebas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks);
5. Bebas dari reklame/spanduk liar

## Indikator Sasaran Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Adapun indikator dan target capaian serta batas waktu pencapaian SPM Trantibumlinmas secara nasional telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Adapun target tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Nasional
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	100%	Setiap Tahun

Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Tramtibum Akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- a. Pelayanan Kerugian Materiil;
- b. Pelayanan Pengobatan.

Mutu Pelayanan :

- a. Pelayanan Kerugian Materi

Kerugian materi adalah berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.

Kerugian materi terdiri atas :

- Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.
- Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.

- b. Pelayanan Pengobatan

Pelayanan pengobatan merupakan tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang/berat.

Pencapaian indikator SPM Trantibum Linmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebagai berikut:

Realisasi Pencapaian Target Indikator SPM Trantibum Linmas Pada tahun 2022 tidak ada warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2. Kerugian Materiil Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2022

Kerugian Materiil					
Ringan		Sedang		Berat	
Jumlah Kasus	Total Jumlah Kerugian (Rp)	Jumlah Kasus	Total Jumlah Kerugian (Rp)	Jumlah Kasus	Total Jumlah Kerugian (Rp)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Selama tahun 2022 tidak ada kegiatan penegakan Perda dan/atau Perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang menimbulkan kerugian materiil.

Tabel 3. Pelayanan Pengobatan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2022

Pelayanan Pengobatan			
Pertolongan Pertama		Rujuk ke Rumah Sakit/Puskesmas	
Jumlah Kasus	Biaya Perawatan (Rp)	Jumlah Kasus	Biaya Transportasi (Rp)
0	0	0	0
0	0	0	0

Selama tahun 2022 tidak ada kegiatan penegakan Perda dan/atau Perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang menimbulkan korban yang harus diberikan pelayanan pengobatan.

## Indikator Sasaran Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Untuk Target Indikator Sasaran Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di tahun 2022 sebesar 91% dengan realisasi 100%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Adapun perhitungan Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu:

1. Serapan Anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%  
Realisasi =  $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$
2. Serapan Anggaran  $< 80\%$  dan output  $< 100\%$   
Realisasi =  $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
3. Serapan Anggaran  $\geq 80\%$ , namun output  $< 100\%$   
Realisasi =  $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$

Realisasi	Bobot	Realisasi	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Realisasi Output	50%	100%	50%
Realisasi Keuangan	40%	88,1%	40%
Realisasi Efisiensi	10%	100,0%	10%
TOTAL Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran			100%

## Indikator Sasaran pada Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja 2022 terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran dimana 5 dari 10 sasaran tersebut merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bukan menjadi pengampu langsung kelima KSD tersebut namun sebagai Perangkat Daerah pendukung dalam keberhasilan KSD tersebut sebagai berikut:

- 1.KSD 13 "Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" dengan Sasaran Strategis Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak;
- 2.KSD 29 "Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko" dengan Sasaran Strategis Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta;
- 3.KSD 39 "Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA" dengan Sasaran Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel;
- 4.KSD 61 "Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan" dengan Sasaran Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel;
- 5.KSD 73 "Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian" dengan Sasaran Strategis Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta.

Dari Ke-5 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga perolehan hasil capaian KSD di Tahun 2022 sebesar 100%.

Adapun Penanggung Jawab Pelaporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2022 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penanggung Jawab Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.

## Indikator Sasaran Pada Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional)

Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdiri dari sasaran-sasaran pendukung tercapainya Sasaran Strategis.

Guna mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 8 (delapan) Sasaran Khusus yaitu :

- **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, hasil predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 mendapatkan nilai 96,01 dengan predikat AA, predikat ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu nilai 91 dengan predikat A.

- **Terselesaikannya sanksi pelanggaran 5 M (Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan).**

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan protokol kesehatan 5M, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa tindakan terhadap para pelanggar yang terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

- a. Penindakan penggunaan masker

Bagi para pelanggar penggunaan masker dikenakan sanksi berupa kerja sosial ataupun denda administrasi

- b. Penindakan pelanggaran bagi organisasi/ badan usaha

Bagi para pelanggar, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mengenakan sanksi berupa pembubaran, teguran tertulis, penutupan sementara 1x24 jam, penutupan sementara 3x24 jam, denda administratif, pembekuan sementara, penutupan 7x24 jam dan denda.

- **Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Nilai PMP RB Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah sebesar 96,46 persen lebih besar daripada target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95 persen.

- **Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif.**

Berdasarkan hasil penilaian, Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan opini laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun.

- **Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Persentase pemanfaatan E-Order menjadi salah satu indikator target Sasaran Khusus Kinerja Eselon II Satpol PP dengan pengukuran kinerja Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Adapun realisasi capaian Persentase Pemanfaatan E-Order tahun 2022 adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan diawal tahun

- **Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan capaian Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta terkait Implementasi Rencana Strategis Komunikasi Publik Program Unggulan dengan tindak lanjut sebagai berikut :

- 1.Strategi Komunikasi Program Unggulan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, dengan Program Kegiatan Peningkatan Budaya Tertib Bagi Masyarakat dalam Pemanfaatan Fasilitas Umum.
- 2.Editorial Plan sesuai Strategi Komunikasi Program Unggulan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan kampanye dan sosialisasi program Peningkatan Budaya Tertib Bagi Masyarakat dalam Pemanfaatan Fasilitas Umum baik dalam bentuk pembuatan dan penyebaran press release, produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi motion grafis.
- 3.Materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis.
- 4.Publikasi materi komunikasi melalui media yang dimiliki Satpol PP Provinsi DKI Jakarta antara lain, website Satpol PP, Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube

Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari target 100% dengan realisasi 100%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

- **Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan**

Adapun Indikator Sasaran adalah Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun seluruh Perangkat Daerah yang terproses/terdisposisi, dari target 100% dengan realisasi 100%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

- **Peningkatan penggunaan e-produk hukum**

Adapun Indikator Sasaran adalah Jumlah perbal /produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal, dari target 100% dengan realisasi 100%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Selain Sasaran Khusus, dalam perjanjian kinerja tahun 2022 juga ditetapkan sasaran operasional yang juga mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun sasaran operasional yang mendukung sasaran strategis terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial adalah meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat. Bentuk kegiatan berupa pelaksanaan tindak lanjut aduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM), JAKI, Qlue, Twitter, Email, SMS Center, SP4N Lapor, Facebook, Lapori708, Twitter Gubernur, Aduan Biro Pemerintahan, Balai Warga, Aduan Walikota, Facebook Wakil Gubernur.

Realisasi kegiatan ini didapat dari jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%. Pada Tahun 2022 persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 90,45%, dengan hasil pencapaian diatas 90% maka dapat dikatakan Satpol PP telah cukup berhasil dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Sasaran Operasional yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran adalah meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Berdasarkan hasil verifikasi dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja telah menyelesaikan persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Terdapat 2 (dua) indikator sasaran baru yang ditetapkan yaitu

- Tingkat Penegakan Perda dan Perkada
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Program penunjang tujuan dan sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta juga mengalami penyederhanaan dengan memperhatikan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari 4 (empat) program yang ditetapkan pada Dokumen Renstra 2017-2022, kemudian disesuaikan menjadi 2 (dua) program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam Renstra Perubahan, keempat program yang sebelumnya telah ditetapkan diturunkan menjadi indikator program. Pada indikator program sebelumnya yaitu Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional digabung menjadi satu ke indikator program Indeks kepuasan pelayanan kantor.

Berikut adalah tujuan dan sasaran rencana strategis Tahun 2017-2022 sesudah perubahan :

### Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2018-2022 sebelum perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Target				
				Indikator Program	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum		Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47
			Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan/ perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum	55	55	70	80	90
			Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial	Persentase berkas perkara kasus pelanggaran perda dan/atau perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan kategori P21	5	10	15	20	25
2	Mewujudkan tata kelola organisasi Satpol PP yang transparan dan akuntabel			Skor EKPPD	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3
		Terwujudnya pelayanan kantor yang optimal, efisien dan efektif dalam mendukung kinerja pegawai	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3	3	3	4	4
		Terwujudnya pelayanan trantibum di wilayah melalui patroli anggota Satpol PP	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	4	4

(Sumber data Renstra Satpol PP DKI Jakarta )

## Tujuan dan Sasaran Satpol PP Tahun 2018-2022 sesudah perubahan

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran / Indikator Program	Satuan	Target Capaian				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<b>Tujuan :</b> Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada	Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)	Nilai	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47
<b>Sasaran 1 :</b> Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	Persen				90	95
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	55	55	70	80	90
	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	Persen	5	10	15	20	25
<b>Sasaran 2 :</b> Terwujudnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen				91	91
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Nilai	3	3	3	4	4

(Sumber e-sakip Satpol PP DKI Jakarta )

### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 :

#### Indikator Kinerja Utama Satpol PP DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Target Capaian				
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan bebas konflik sosial	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan/ atau Perkada terkait ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan / Jumlah pelanggaran Perda yang terdata x 100%	%	55	55	70	80	90
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase berkas perkara kasus pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan kategori P21	Jumlah berkas pelanggaran Perda yang berhasil disidangkan / Jumlah berkas pelanggaran Perda yang terdata x 100%	%	5	10	15	20	25

(Sumber data Keputusan Kasatpol PP DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan IKU Satpol PP Tahun 2018-2022)

## Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Utama yang pertama yaitu mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada serata indikator kinerja utama yang kedua yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2022. Berikut disampaikan analisa perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

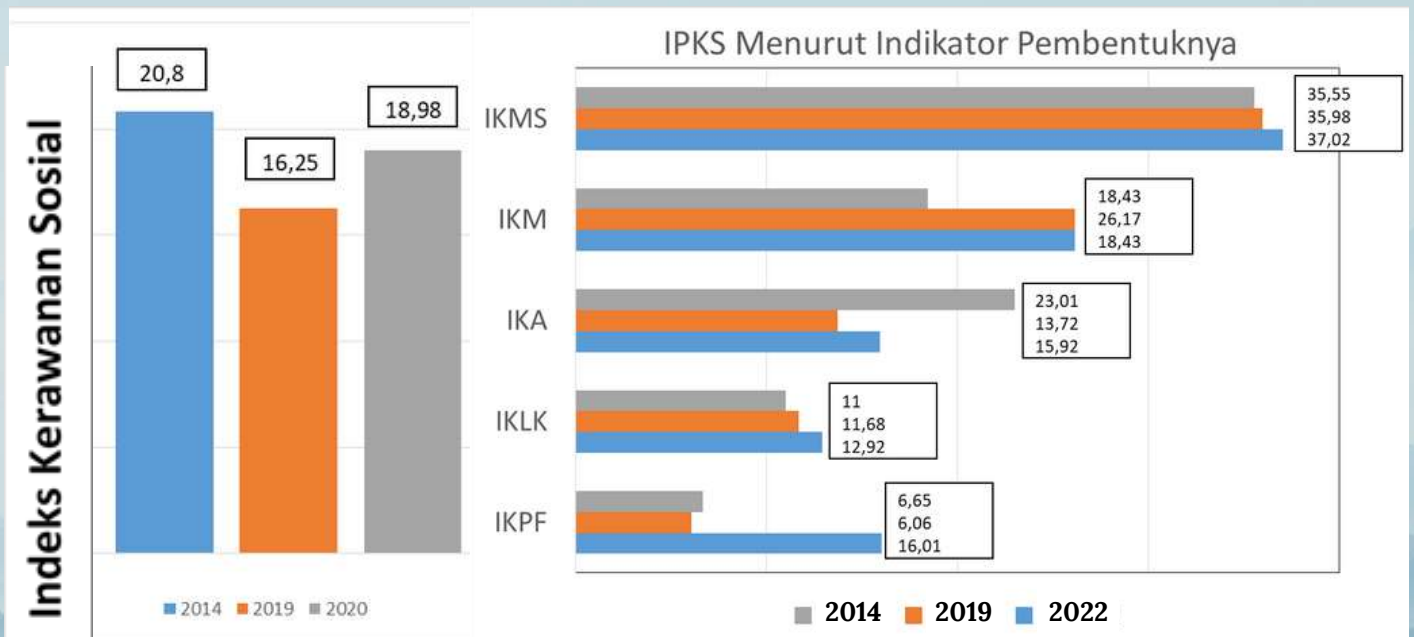
**Tabel Capaian Perbandingan Indikator Tujuan Tahun 2018-2022**

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Satuan	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada	Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)	Nilai	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47	20.8	16.25	18.98	18.98	18.98

Sumber data e-sakip Satpol PP DKI Jakarta

Berdasarkan tabel diatas, target yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 semakin lama semakin menurun hal ini menunjukkan kondisi yang diharapkan di akhir renstra kondisi kerawanan sosial di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 relatif membaik. Realisasi capaian IPKS di tahun 2020 sampai dengan 2022 sama yaitu 18,98 hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan data IPKS publikasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (BPS), dimana pengambilan survey hanya dilakukan 5 (lima) tahun sekali dan tahun terakhir dilakukan perhitungan IPKS adalah di Tahun 2020. Adapun hasil IPKS Tahun 2022 merupakan data yang didapat dari hasil survey di tahun 2020. Secara umum realisasi capaian IPKS dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2018 sampai dengan 2022 tingkat kerawanan sosial di DKI Jakarta relatif membaik.

Angka indeks komposit yang terkandung dalam IPKS merupakan gabungan dari lima indeks (dimensi) penyusunnya. Adapun lima dimensi penyusun IPKS diantaranya Indeks Kerawanan Kemiskinan (IKM), Indeks Kerawanan Lingkungan dan Kesehatan (IKLK), Indeks Kerawanan Prasarana Fisik (IKPF), Indeks Kerawanan Modal Sosial (IKMS), dan Indeks Kerawanan Keamanan (IKA). Berikut adalah perbandingan IPKS menurut indikator pembentuknya yang diambil dari data tahun 2014, 2019 dan 2020



Sumber : statistik.jakarta.go.id

IPKS 2020 merupakan indikator komposit yang merupakan gabungan dari 5 indeks penyusunnya, yaitu Indeks Kerawanan Kemiskinan (IRK), Indeks Kerawanan Lingkungan dan Kesehatan (IKLK), Indeks Kerawanan Prasarana Fisik (IKPF), Indeks Kerawanan Modal Sosial (IKMS), dan Indeks Kerawanan Keamanan (IKK). Indeks Potensi Kerawanan Sosial disusun menurut wilayah kelurahan, kabupaten/kota, dan provinsi. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran sejauh mana potensi kerawanan sosial di suatu kelurahan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk dapat menciptakan ketahanan sosial di wilayah kelurahan tersebut. Nilai IPKS di Provinsi DKI Jakarta pada 2020 naik dibanding 2019. IPKS naik dari 16,25 pada 2019, menjadi 18,98 pada 2020. Ini berarti kondisi kerawanan sosial di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sedikit memburuk dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019.

## Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Organisasi

Sasaran 1 Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial											
Indikator Sasaran : Tingkat Penegakan Perda dan Perkada		Target Capaian					Realisasi Capaian				
Program	Indikator Program	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55%	55%	70%	80%	90%	98.70%	98.89%	95.84%	93.91%	92,72%
	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	5%	10%	15%	20%	25%	88.03%	92.57%	90.59%	93.68%	89,16%

Berdasarkan tabel diatas, Target capaian indikator program Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan indikator program Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21 yang ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2018-2022 trennya semakin lama semakin naik. Hal ini menandakan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah, maka pencapaian kinerja semakin rendah. Adapun realisasi capaian secara rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaiannya > 90%. Keberhasilan dalam pencapaian ini tentu saja akan mendorong keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

## Sasaran Strategis I : Terwujudnya Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman Umum dan Bebas Konflik Sosial

Indikator Sasaran : Tingkat penegakan Perda dan Perkada

Indikator sasaran tingkat penegakan Perda dan Perkada adalah indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2022. Indikator ini mengukur kinerja Satpol PP secara preventif dan korektif. Adapun Rumus capaian adalah sebagai berikut :

$$\frac{(\% \text{ capaian giat preventif} + \% \text{ penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada})}{2} \times 100 \%$$

$$\text{Rumus \% capaian giat preventif} = \frac{\text{jumlah giat preventif yang dilaksanakan}}{\text{jml giat preventif yang direncanakan}} \times 100 \%$$

$$\text{Rumus \% penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada} = \frac{\text{jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}}{\text{jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terdata}} \times 100 \%$$

Persentase capaian jumlah kegiatan preventif yang dilaksanakan Satpol PP di tahun 2022 adalah sebesar 100% sedangkan persentase capaian penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 92,72% sehingga hasil capaian persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{100\% + 92,72\%}{2} = 96,50 \%$$

sehingga capaian kinerja yang didapat bila dibandingkan dengan target adalah sebesar 107,22%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mendukung tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan mendukung capaian sasaran pada RPJMD 2017-2022 yaitu terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan bebas konflik sosial .

Tabel Capaian Indikator Sasaran Tingkat Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2022

TINGKAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA TAHUN 2022		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
90%	92.72%	100%

Sumber e-Sakip,diolah

## Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman Umum dan Bebas Konflik Sosial

### Faktor Pendukung :

- Adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- Pelaksanaan tugas didukung oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan unsur TNI/Polri;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial secara tepat guna dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses segala hal. Misalnya, apabila ada informasi terkait banjir, kebakaran, maupun tawuran, masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dan melaporkannya secara real time, sehingga pihak pengambil kebijakan dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut;
- Komitmen yang besar dari Kasatpol PP dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007;
- Komitmen yang besar dari jajaran bidang-bidang Satpol PP terkait pelaksanaan kegiatan secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban;
- Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;
- Permohonan penertiban dari UKPD terkait, Camat, dan Lurahberjalan sesuai dengan target.

### Faktor Penghambat :

- Pandemi COVID-19 masih membawa dampak terhadap kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022, sehingga untuk dapat mengarusutamakan penanganan pandemi maka dilakukan rasionalisasi APBD pada Tahun 2022 yang menyebabkan beberapa kegiatan di Satpol PP tidak dapat dilakukan secara maksimal, diantaranya kegiatan Pembentukan Masyarakat Peduli Tramtibum yang diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk upaya mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial;
- Rasionalisasi anggaran menyebabkan penyediaan terhadap sebagian sarana pendukung pelaksanaan tugas Satpol PP belum dapat diakomodir di Tahun 2022;
- Kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19 menjadi tantangan bagi pelaksanaan penegakan Perda dan/atau Perkada di masa pandemi. Pembatasan jam operasional tempat usaha hingga pembatasan pengunjung tidak sedikit yang ditemukan Penolakan dalam pelaksanaannya

## Tabel Rekapitulasi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

Wilayah Penertiban	No. Perda/Perkada yang dilanggar	Jumlah Hasil Wasdak	Tindak Lanjut Administrasi				%
			Peringatan	Penutupan/ Penyegehan	Pencabutan Izin	Lainnya	
JAKARTA PUSAT	Perda 8 Tahun 2007, Pergub 80 Tahun 2020	61.388	2.896	6	0	58.486	95,28%
JAKARTA UTARA	Perda 8 Tahun 2007, Pergub 80 Tahun 2020	27.512	1.797	136	0	25,579	93,47%
JAKARTA BARAT	Perda 8 Tahun 2007, Pergub 80 Tahun 2020	63.007	5.804	60	0	57.213	90,80%
JAKARTA SELATAN	Perda 8 Tahun 2007, Pergub 80 Tahun 2020	63.779	5.390	288	0	58.161	91,55%
JAKARTA TIMUR	Perda 8 Tahun 2007, Pergub 80 Tahun 2020	55.394	4.020	305	0	51.069	92,74%
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	Perda 8 Tahun 2007, Pergub 80 Tahun 2020	56	0	0	0	56	100%
PROVINSI DKI JAKARTA	Pergub 148 Tahun 2017 dan Pergub 80 Tahun 202	3.965	137	57	0	3.771	96,54%
<b>JUMLAH</b>		<b>275.171</b>	<b>20.044</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>254.335</b>	<b>92,72%</b>

(Sumber data Seksi Datin Satpol PP DKI Jakarta )

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum di 5 (lima) wilayah Kota/Kabupaten Administrasi DKI tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 255.127 (792 + 254.335) pelanggaran, bila dibandingkan dengan jumlah pelanggaran sebesar 275.171 pelanggaran maka didapat persentase penyelesaian pelanggaran sebesar 92,72%. Realisasi tersebut menunjukkan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 90%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jenis pelanggaran yang paling banyak dalam penyelesaian pelanggaran Perda dan/ atau Perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2022 adalah penertiban penggunaan masker sebanyak 150.572 pelanggar yang dilakukan penindakan kerja sosial dan denda administrasi sedangkan jenis pelanggaran paling sedikit adalah jenis Tertib Pengelolaan Sampah sebanyak 3 (tiga) pelanggaran.

## Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan / atau Perkada yang Dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21 Tahun 2022

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH BERKAS PERKARA	PENYELESAIAN BERKAS PERKARA	DENDA (RP)	PERSENTASE PENYELESAIAN
1	SATPOL PP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	195	144	68.332.000	73,85%
2	SATPOL PP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	305	262	54.605.000	85,90%
3	SATPOL PP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	231	225	421.100.000	97,40%
4	SATPOL PP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	270	246	332.672.000	91,11%
5	SATPOL PP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	309	291	61.095.000	94,17%
6	SATPOL PP KAB ADMINISTRASI KEP.1000	0	0	0	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.310</b>	<b>1.168</b>	<b>937.804.000</b>	<b>89,16%</b>

(Sumber data Seksi Datin Satpol PP DKI Jakarta )

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan berkas perkara kasus pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan kategori P-21 sebanyak 1.168 berkas perkara. sehingga realisasi persentase penyelesaian jika dibandingkan 1.310 berkas perkara yang ditangani menjadi 89,16%. Dengan pencapaian 100% dari target 25% ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah maksimal melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, dapat dijelaskan jenis pelanggaran yang paling banyak dilanggar adalah Tertib tempat usaha tertentu sesuai dengan pasal 25 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi "Setiap orang/badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima". Sebanyak 1.306 berkas perkara dengan jumlah denda sebesar Rp. 932.498.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Kemudian Pelanggaran Perda 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terdapat 3 (tiga) berkas perkara dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 130 ayat 1 point a "setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan pelanggaran Perda 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame terdapat 1 (satu) berkas perkara dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 35

## Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran

### Indikator Sasaran : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengukur 3 (tiga) komponen yaitu :

#### Penyerapan anggaran

Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran  $\geq 80\%$ . Apabila serapan anggaran di bawah  $< 80\%$  maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%).

#### Efisiensi

Sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.

#### Pencapaian output

Persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev anggaran hasil inputan Perangkat Daerah.

#### Formulasi Pengukuran adalah sebagai berikut :

- **Serapan anggaran = 80% dan Output 100%**  
Realisasi = (40%) + (%Efisiensi x 10%) + (Pencapaian Output x 50%)
- **Serapan anggaran < 80% dan Output < 100%**  
Realisasi = (Penyerapan Anggaran x 40%) + (%Efisiensi x 10%) + (Pencapaian Output x 50%)
- **Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan Output 100%**  
Realisasi = (40%) + (Pencapaian Output x 50%)

## Tabel Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Realisasi	Bobot	Persentase Realisasi	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Realisasi Keuangan	50%	100%	50%
Realisasi Output	40%	88,1%	40%
Realisasi Efisiensi	10%	100%	10%
			<b>100%</b>

### Total Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa target kinerja dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Untuk indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, target yang ditetapkan adalah sebesar 91% sedangkan realisasi sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% ini didapat dari hasil perhitungan dengan komposisi variabel Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Capaian Output Perangkat Daerah. Tingkat capaian keberhasilan mencapai 109,89%, yang berarti interpretasi yang didapatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi.

### Capaian Kinerja Realisasi Indikator Sasaran Pada Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91 %	100%	109,89%	Sangat Tinggi

### Program Pendukung

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	100 %	Sangat Tinggi
---	----------------------------------	--------	---	---	-------	---------------

Sumber data e-Sakip Satpol PP DKI Jakarta

# Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran

## Faktor Pendukung

- Komitmen yang besar dari unsur pimpinan dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai sesuai amanat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016
- Komitmen terhadap pencapaian target kinerja yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja mulai dari unsur Pejabat Struktural dan dicascadingkan hingga unsur staf di Lingkungan Satpol PP, sehingga pelaksanaan tugas menjadi terukur dan terarah
- Manajemen pengendalian yang baik untuk memastikan konsistensi kegiatan tahunan terhadap dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra)
- Sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan (Smart Planing Budgeting), monitoring dan evaluasi (eMonev) hingga pengelolaan keuangan (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)
- Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- Integritas dan kepedulian pegawai yang tinggi dalam upaya penyelesaian tugas yang diemban

## Faktor Penghambat

- Rasionalisasi anggaran menyebabkan penyediaan terhadap sebagian sarana pendukung pelaksanaan tugas Satpol PP belum dapat diakomodir di tahun 2022

## PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 2

### PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

#### INDIKATOR PROGRAM

#### Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

**Tabel Capaian Indikator Program Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor Tahun 2022**

Program	Indikator Program	Kinerja Program		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks	4 Indeks	100%

Sumber data e-Sakip Satpol PP DKI Jakarta

Realisasi kinerja program Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor tahun 2021 sebesar 4 indeks dengan target yang ditetapkan sebesar 4 indeks sehingga capaian program tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah "sangat baik".

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Satpol PP pada tahun 2021 melaksanakan survey kepuasan layanan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dengan 1 (satu) program penunjang. Seluruh layanan tersebut secara aktif telah diselenggarakan, adapun survei kepuasan masyarakat terhadap layanan tersebut dilaksanakan secara daring melalui kuesioner google form. Pemilihan format survei tersebut dikarenakan penerima layanan adalah internal (unit kerja maupun pemangku kepentingan) di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan dengan demikian hasil survei dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Survei dilakukan dengan metode kuesioner yang terdiri atas beberapa pernyataan dan menggunakan skala likert (1-4) untuk penilaiannya, dan metode esai yang memberikan ruang bagi pegawai yang ingin memberikan kritik, masukan atau saran terkait layanan publik kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan diadakan survei adalah untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan efektif. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat kepuasan layanan Satpol PP diukur dengan cara melakukan survei kepuasan masyarakat dan survei integritas pelayanan publik dengan melibatkan sebanyak 95 reponden yang terdiri dari :

1. Pejabat Eselon
2. Staf PNS
3. Staf PTT
4. Staf PJLP

#### Komponen survei kepuasan layanan kantor terkait dengan :

- Ketersediaan jasa administrasi keuangan.
- Ketersediaan alat tulis kantor;
- Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Ketersediaan makanan dan minuman;
- Ketersediaan telepon, air, listrik dan internet (TALI);
- Ketersediaan mesin foto copy;
- Ketersediaan kebersihan kantor;
- Ketersediaan alat kebersihan gudang Satpol PP;
- Ketersediaan perlengkapan gedung kantor

Survei Integritas Pelayanan Publik yang terkait dengan tingkat integritas pelayanan publik terhadap :

- Layanan petugas dalam pemenuhan ketersediaan jasa administrasi keuangan;
- Layanan petugas dalam pemenuhan ketersediaan alat tulis kantor;
- Layanan petugas dalam pemenuhan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Layanan petugas dalam pemenuhan ketersediaan makanan dan minuman;
- Layanan petugas dalam penanganan ketersediaan telepon, air, listrik dan internet;
- Layanan petugas dalam pemenuhan ketersediaan mesin fotokopi;
- Layanan petugas dalam pemenuhan ketersediaan makanan dan minuman;
- Layanan petugas dalam pemenuhan ketersediaan kebersihan kantor;
- Layanan petugas dalam pemenuhan ketersediaan perlengkapan gedung kantor.

Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terhadap 9 (sembilan) jenis layanan publik didapat nilai hasil survey kepuasan masyarakat. Nilai ini disesuaikan dengan tabel Nilai Persepsi, Nilai interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan kinerja Unit Pelayanan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun tabel panduan hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

**Tabel Cara Penilaian survey kepuasan Masyarakat**

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

**Tabel Capaian Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor per Jenis Pelayanan Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan
1	Ketersediaan jasa administrasi keuangan	114,38	A
2	Ketersediaan alat tulis kantor	88,59	A
3	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	88,59	A
4	Ketersediaan makanan dan minuman	88,47	A
5	Ketersediaan telepon, air, listrik dan internet (TALI)	88,51	A
6	Ketersediaan mesin foto copy	88,53	A
7	Ketersediaan kebersihan kantor	88,52	A
8	Ketersediaan alat kebersihan gudang Satpol PP	88,52	A
9	Ketersediaan perlengkapan gedung kantor	91,2	A

Sumber data Subag Umum Satpol PP DKI Jakarta

## Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

1

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2

Administrasi Umum Perangkat Daerah

3

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan 4 (empat) kegiatan di atas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa langkah strategis yang dapat mendukung tercapainya realisasi program yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang mendukung kegiatan tersebut diantaranya melalui pelaksanaan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### Perbandingan Kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dengan Satpol PP Kota Penyangga

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki salah satu Indikator Kinerja Utama berupa Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, hal ini tentu saja berbeda dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang memiliki indikator kinerja berupa Tingkat penegakan Perda dan Perkada. Namun Indikator Kinerja Utama tersebut sama-sama didukung oleh program pendukung (indikator program) berupa Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan). Hasil perbandingan dengan Kota Bekasi menunjukkan bahwa baik Satpol PP Kota Bekasi maupun Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan hasil yang sangat berhasil karena realisasi dari kedua program pendukung telah mencapai >90%. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi pencapaian hasil kinerja :

**Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kota Penyangga**

SATPOL PP	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI
Satpol PP Prov. DKI Jakarta Tahun 2022	Tingkat penegakan Perda dan Perkada	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) melalui program penyelenggaraan trantibum serta linmas	90%	92,72%
		Program penegakan Perda dan/ Perkada secara yutisial	25%	89,16%
Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2022	Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100%	100%
		Program penegakan Perda	100%	100%

Sumber : Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Satpolpp.bekasikota.go.id)

## Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, adapun tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		
			Capaian Kinerja%	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	100%	95,86%	4,14%
2	Terwujudnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	0%

Sumber data Subbag Program Satpol PP DKI Jakarta

Jika dilihat pada tabel diatas, kedua indikator sasaran menunjukkan hasil capaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran yang sangat tinggi ( $\geq 90\% \leq 100\%$ ). Dengan capaian kinerja kedua indikator sasaran 100% dan lebih tinggi daripada persentase penyerapan anggaran maka dapat dikatakan efisien, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,9% dan 6,3%, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dapat meHal tersebut disebabkan karena Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya antara lain mengubah budaya kerja dalam bentuk peningkatan kinerja dan menegakkan integritas, melakukan inovasi, koordinasi yang baik dengan instansi samping, dan optimalisasi sarana prasarana yang ada. meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

## Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	95%	95,86%	109,05
	Program	Kegiatan			
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.772.228.340	Rp.2.473.531.410	89,23%
		Penanganan Gangguan Trantibum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp.563.712.276.280	Rp.456.706.729.160	81,02%
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rp.11.876.915.413	Rp.10.909.928.690	91,86%
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Rp.1.140.886.304	Rp.1.101.322.800	96,53%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.579.502.306.337</b>	<b>Rp.471.191.512.060</b>	<b>81,31%</b>	
2	Terwujudnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	100%	109,89%
	Program	Kegiatan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.757.240.567.548	Rp.741.317.489.084	97,90%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.22.683.465.445	Rp.24.021.637.426	105,90%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Rp.20.871.992.109	Rp.19.191.365.238	91,95%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.225.604.645	Rp.718.870.260	58,65%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.802.021.629.747</b>	<b>Rp.785.249.362.008</b>	<b>97,91%</b>	

Sumber data Subbag Program Satpol PP DKI Jakarta

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan telah berhasil mendukung pencapaian indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian kinerja yang melebihi 100% yang disertai dengan penyerapan anggaran program yang baik yaitu 81,09% dan 97,65%. Dengan capaian serapan anggaran yang baik tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta telah berhasil melaksanakan kegiatan pendukung keberhasilan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sebagian kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 90% diantaranya disebabkan oleh kendala teknis seperti keterbatasan waktu proses pengadaan barang jasa, harga perolehan lebih rendah dari pagu anggaran, hingga keterbatasan kegiatan akibat pandemi.



# REALISASI ANGGARAN

Secara umum, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam memenuhi target masing-masing sasaran dapat tercapai berkat dukungan pengalokasian anggaran yang baik. Dukungan pagu anggaran untuk 2 (dua) sasaran strategis pada tahun 2022 sebesar Rp.1.422.283.950.943,- (satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Pada akhir tahun 2022 anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp.1.256.440.874.068,- (satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) dengan presentase serapan anggaran sebesar 90,95%.

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Terwujudnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien	Terwujudnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	578,382,062,194	471,191,512,060	81.31%
2	Terwujudnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	843,901,888,749	785,249,362,008	97.91%
Total				1,422,283,950,943	1,256,440,874,068	90.95%

Sumber data Subbag Program Satpol PP DKI Jakarta

Dari 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dikatakan bahwa perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja memiliki rata-rata realisasi keuangan per-program dengan kategori Sangat Tinggi ( $90,95\% \leq 100\%$ ).

## Analisis Capaian Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran didasarkan pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait berdasarkan sisa anggaran yang tidak terserap pada setiap indikator. Anggaran dapat dikatakan efisien apabila target Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dan masih terdapat sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai dan sisa dana tersebut tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.

Seluruh target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2022 berhasil direalisasikan, baik dalam hal capaian kinerja indikator tujuan, sasaran maupun program dengan capaian 100%. Pencapaian tersebut dapat diraih berkat komitmen pimpinan dan jajaran elemen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Kecamatan hingga Kelurahan.

Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Perorangan Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang realisasinya dilaporkan setiap Triwulan melalui website <https://sakip.jakarta.go.id>

Dukungan pagu anggaran untuk 2 (dua) sasaran strategis pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.422.283.950.943,- (satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Pada akhir Tahun 2022 anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp.1.256.440.874.068,- (satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 88,34%.

## Tabel Perbandingan Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018-2022

<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran</b>														
Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target			Realisasi			Program	Indikator Program	Target		Realisasi	
			2018	2019	2020	2018	2019	2020			2021	2022	2021	2022
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	3	3	3	-	-	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	4	4
	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	3	3	3	-	-	3			4	4	4	4

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perubahan program dalam Rencana Strategis dimana 2 (dua) program yang ditetapkan di awal renstra berubah di Tahun 2021 menjadi 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Begitupula dengan Indikator Program dimana pada awal Renstra terdapat 2 (dua) indikator program dan terjadi perubahan di Tahun 2021 dan 2022 dengan menggabungkan Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional ke dalam Indeks kepuasan pelayanan kantor. Adapun target nilai indikator program tidak mengalami perubahan. Adapun target dari 2 (dua) Indikator program yang ditetapkan dalam restra Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah nilai 3 sedangkan di tahun 2021 dan 2022 naik menjadi nilai 4. Pada Tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan pengukuran terhadap indeks kepuasan pelayanan kantor maupun indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional. Namun di Tahun 2020 dilakukan pengukuran dengan hasil nilai 3 begitupula pada tahun 2021 dan 2022 dilakukan pengukuran kembali dengan hasil nilai 4. Kedua hasil pengukuran tersebut mendapatkan capaian 100 persen dan mendukung pencapaian perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan capaian target kinerja pada Tahun 2022 tersebut telah menyiapkan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 1.381.827.977.646,- namun dalam perjalanannya dilakukan rasionalisasi APBD pada Tahun 2022. Dalam penetapan APBD-P Tahun 2022, Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dirasionalisasi menjadi sebesar Rp.1.422.283.950.943,- (satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Rasionalisasi tersebut untuk mengakomodir kenaikan harga BBM pada tahun 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

#### Indikator Program Satpol PP DKI Jakarta Tahun 2022

#### Indikator Program Tahun 2022

INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 843.901.888.749,-
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 578.382.062.194,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 1.422.283.950.943,-</b>

(Sumber data e-monev, diolah)





# **BAB IV**

# **KESIMPULAN**

# A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2022 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Dari hasil evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada setiap tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik.

Dalam mencapai sasaran strategis mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan perda dan perkada dengan indikator kinerja tingkat penegakan perda dan perkada telah tercapai realisasi pada Triwulan IV sebesar 95,86 dari target 95 hal ini menandakan tingkat pencapaian yang berhasil. Untuk program pendukung sasaran strategis yaitu Program Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditetapkan 2 (dua) indikator program yaitu Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target sebesar 90%, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai realisasi sebesar 91,72%. Selain itu target indikator Program berupa persentase penegakan Perda dan/ perkada secara yutisial sebesar 25%

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai realisasi sebesar 89,02%.

Berkaitan dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran dicapai realisasi presentasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 100 % dari target 91%, hal ini dapat disimpulkan bahwa perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja memiliki rata rata realisasi keuangan per-program dengan kategori Sangat Tinggi (91%≤ 100%). Pencapaian ini tentu saja merupakan keberhasilan yang harus tetap dipertahankan. Mengingat untuk Indikator Penegakan Perda dan Perkada merupakan indikator yang baru ditetapkan di Tahun 2021.

Untuk Program Pendukung sasaran strategis yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dari target Indeks Kepuasan pelayanan kantor dengan nilai 4 (empat), Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berhasil mendapatkan nilai 4 (empat). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Satpol PP tinggi. Dari segi anggaran, Tahun 2022 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai maka dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1,422,283,950,943,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1,256,440,874,068,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,95%.

## B MASUKAN DAN SARAN

Sebagai penanggungjawab program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta program penegakan Perda dan/perkada secara yutisial guna mencapai target indikator IPKS melalui indeks Kerawanan Keamanan dan Ketertiban (IKA), Satpol PP Provinsi DKI Jakarta perlu didukung dengan strategi-strategi untuk menyelenggarakan fungsi secara optimal, efektif, efisien dan Inovatif, diantaranya melalui :

1. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Pembangunan Command Center Satpol PP berbasis teknologi digital, Kegiatan Goes to School dan Pemberlakuan Kartu Kuning bagi pelanggar Perda/Perkada, hal ini sebagai inovasi baru yang telah dilaksanakan Satpol PP di Tahun 2022.
2. peningkatan sarana prasarana Satpol PP berupa :
  - pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
  - Untuk mendukung pelayanan di tingkat wilayah melalui rencana pembangunan kantor Satpol PP tingkat Kecamatan
  - peningkatan sarana dan prasana pendukung kegiatan operasional, dan kesiapsiagaan dalam perlindungan masyarakat (alat berat pendukung penertiban hingga sarana kesiagaan kebencanaan)
  - Peningkatan sarana pendukung dengan menggunakan energi terbarukan
3. Melakukan Evaluasi terhadap peraturan terkait penegakan perda dan perkada



# LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA PROVINSI DKI  
JAKARTA TAHUN 2022



## PIAGAM PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA:

*Satuan Polisi Pamong Praja*

SEBAGAI PERAIH

**Predikat AA (95,08)**

*Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021*

Jakarta, 12 April 2022

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.



DKI JAKARTA

## PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

**KEPALA SATPOL PP PROVINSI DKI JAKARTA**

Atas Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, Desember 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Jackson Lapalonga, M.Si

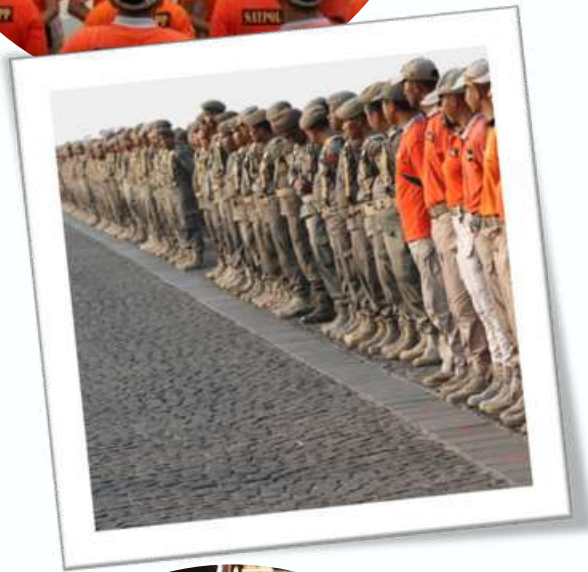
Brigadir Jenderal Polisi



# DOKUMENTASI KEGIATAN



**BANTUAN PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT  
DI TINGKAT KELURAHAN**



**BANTUAN PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT  
OLEH PEGAWAI TIDAK TETAP  
(PTT) SATPOL PP**



**PENYELENGGARAAN BANTUAN  
PENGAMANAN**

# DOKUMENTASI KEGIATAN



**BPENYUSUNAN NASKAH  
AKADEMIS PERDA URUSAN  
KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**



**PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DALAM MENGHADAPI  
KEBENCANAAN**



**PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN SENGKETA**

# **DOKUMENTASI KEGIATAN**



**PENUTUPAN TEMPAT  
USAHA/PENGHENTIAN KEGIATAN  
USAHA YANG MELANGGAR  
PERDA DAN ATAU PERKADA**



**PEMUSNAHAN HASIL OPERASI  
MINUMAN BERALKOHOL**



**PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI SATPOL PP**

# DOKUMENTASI KEGIATAN



**PEMBINAAN MENTAL, FISIK DAN  
DISIPLIN**



**PEMBINAAN  
KEPAMONGPRAJAAN DAN  
PENGEMBANGAN KARIER BAGI  
PEJABAT FUNGSIONAL POL PP**



**PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS  
DAN KELENGKAPANNYA**

# DOKUMENTASI KEGIATAN



**PEMBENTUKAN MASYARAKAT  
PEDULI TRAMTIBUM**



**PEMBANGUNAN PEMAHAMAN  
KETENTERAMAN, KETERTIBAN  
UMUM DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT SEJAK DINI**



**PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN TEMPAT  
USAHA**

# DOKUMENTASI KEGIATAN



**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN  
MEDIA INFORMASI DAN PROMOSI  
PADA JALAN PROTOKOL DAN  
FASILITAS UMUM**



**PENGAWASAN DAN  
PENERTIBAN TEMPAT USAHA  
HIBURAN DAN REKREASI  
BERSAMA TIM TERPADU PADA  
HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN**



**PENGUATAN PEMANTAUAN  
TITIK RAWAN GANGGUAN  
TRAMTIBUM**

# **DOKUMENTASI KEGIATAN**

**PENINGKATAN KAPASITAS PPNS**



**PENYELENGGARAAN  
PENERTIBAN BAGI PELANGGAR  
PERATURAN DAERAH DAN  
PERATURAN LAINNYA**



**PENYUSUNAN NASKAH  
AKADEMIS DAN DRAFT  
RAPERDA**



**DISUSUN OLEH**  
**SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**  
**SEKRETARIAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**



**TAHUN 2023**